

Analisis Wacana Liputan *BALI TV* Dalam Kasus Kemoning-Budaga, Klungkung, Bali

I Komang Arba Wirawan

Program Studi Film dan Televisi, Fakultas Seni Rupa dan Desain
Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar
arbawirawan10@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis wacana liputan *Bali TV* dalam kasus bentrokan antara desa Kemoning dan desa Budaga, Klungkung, Bali, yang meletus 17 September 2011. Liputan kasus ini memojokkan Gubernur Made Mangku Pastika, seperti hendak membubarkan desa *pakraman* atau desa adat di Bali. Gubernur Made Mangku Pastika tidak menerima dan melakukan somasi bahkan menuntut *Bali Post* secara perdata di Pengadilan Negeri Denpasar. Hubungan antara Gubernur Made Mangku Pastika dan Kelompok Media Bali Post (KMB) yang pada awalnya baik kemudian menjadi konflik yang serius. Wacana pemberitaan *Bali TV* yang ikut memperuncing konflik menarik diteliti untuk mengetahui agenda subjektif di balik politik berita. Data utama penelitian ini adalah wacana pemberitaan *Bali TV* kasus Kemoning-Budaga berupa dokumentasi materi yang pernah ditayangkan. Teori yang digunakan ada empat yaitu teori wacana, agenda *setting*, *framing*, dan semiotika. Keempat teori diaplikasikan secara eklektik untuk menganalisis secara kritis proses pembentukan wacana dan wacana tanding pascabentrok Kemoning-Budaga. Penelitian ini menggunakan paradigma wacana kritis, pendekatan fenomenologis, dan metode kualitatif. Hasil analisis bahwa wacana liputan pascabentrok Kemoning-Budaga di *Bali TV* merupakan perpanjangan wacana *Bali Post* yang dikelola dengan agenda *setting* untuk kepentingan sosial, politik, dan ideologi *Ajag Bali* KMB. Pada saat yang sama Gubernur Made Mangku Pastika juga melakukan wacana tanding dengan memanfaatkan kehumasan Pemprov Bali dan media di luar KMB seperti *TVRI Bali* dan *Radar Bali*.

Abstract

This study is intended to analyze the discourse of Bali TV coverage on the conflict between Kemoning village and Budaga village, Bali, which took place on September 17th, 2011, which led to discourse of the dispersal of the traditional village 'desa pakraman'. Such coverage of the case was considered blaming the Governor of Bali, Mangku Pastika. He was reported to intend to disperse the traditional villages in Bali. The Bali TV and Bali Post, which are under the Bali Post Media Group 'Kelompok Media Bali Post' (abbreviated to KMB) continuously exploited the discourse of the dispersal of the traditional village subjectively. The Governor of Bali, Mangku Made Pastika, did not accept that and prosecuted the Bali Post in Denpasar Court of First Instance 'Pengadilan Negeri Denpasar'. The theory of discourse, the theory of agenda setting, the framing theory, and the theory of semiotics are used in the present study.

The result of the analysis shows that the conflict between Kemoning Village and Budaga Village covered by the Bali Post was an extended discourse of the Bali Post printed media which was managed using a clear setting agenda for the social, political, and ideological interests of the KMB's Ajag Bali. The relation between the Governor of Bali, Mangku Made Pastika, and KMB, which was good in the beginning, changed into a serious conflict. It is interesting to explore the discourse of the Bali TV's news release which aggravated the conflict in order to identify the subjective agenda of the news broadcasting policy and the counter discourse as

the response to it. The main data of the present study are the discourse of the news released by the Bali TV on the Kemoning-Budaga case. The data were in the forms of the documents of the materials which were once presented. The Governor of Bali, Mangku Made Pastika, made use of the Department of the Public Relations of the Government of Bali Province and the media beyond the KMB such as the TVRI Bali and Radar Bali to present his counter discourse. The discourse on the Kemoning-Budaga Case shows a real example how the mass media do not pay attention to objectivity for the sake of power.

Kata Kunci

wacana, agenda *setting*, *framing*, desa adat, semiotika, dan wacana tanding

Keyword

discourse, agenda setting, framing, traditional village, semiotics and counter discourse

PENDAHULUAN

Tonggak reformasi yang bermula tahun 1998 memberikan sekurang-kurangnya dua hal penting dalam dunia pertelevisian di Indonesia; pertama, izin mendirikan televisi dipermudah, kedua semua stasiun televisi bebas memproduksi berita. Kemunculan stasiun televisi swasta tidak hanya di pusat melainkan juga di daerah seperti di Bali. Ada empat stasiun televisi swasta lokal Bali yang berizin, yaitu *Bali TV*, *Dewata TV*, *ATV*, *BMC TV*, yang berdiri setelah reformasi. Selain itu, terdapat satu lembaga penyiaran publik, jasa penyiaran televisi *TVRI* Bali, yang telah berdiri sebelum reformasi. Kalau sebelum reformasi banyak yang memilih diam, enggan berbicara, kini banyak orang yang suka berkomentar, reaktif, berlomba tampil sebagai *opinion maker*, pembentuk opini masyarakat¹. Wacana pemberitaan *Bali TV* tentang kasus Kemoning-Budaga yang berupa dokumentasi yang pernah ditayangkan dan diunggah dalam media *on line Youtube*. Benang kusut konstruksi realitas yang dipenuhi ketidakobjektifan dan ekstasi komunikasi tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi dicurigai terkait dengan kekuatan atau kekuasaan yang bersembunyi di balik media. Oleh karena itu, pemaknaan yang berbeda merupakan arena pertarungan dan diskusi publik yang saling

mempengaruhi kelompok sosial². Menurut Gandita Rai Anom hal itu merupakan wacana tanding gagalnya pembunuhan karakter oleh *Bali Post* terhadap Gubernur Made Mangku Pastika.³ Berita televisi bukan merupakan jendela dunia tanpa perantara, melainkan suatu representasi selektif dan dikonstruksi untuk membangun realitas⁴.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis wacana berita “pembubaran desa *pakraman*” dalam liputan *Bali TV* pascabentrok Kemoning-Budaga, Klungkung, Bali. Pemberitaan pembubaran desa *pakraman* pascabentrok Kemoning-Budaga oleh *Bali Post* edisi Senin, 19 September 2011 yang selanjutnya dikembangkan, di-*setting*, dan di-*framing* dalam berita *Bali TV* menjadi permasalahan melalui pengadilan perdata. Tulisan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya. Bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang kepentingan ekonomi dan kekuasaan ideologi

1 I Nyoman Darma Putra, *Bali dalam Kuasa Politik* (Denpasar, 2008), hal. 147

2 Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media* (Yogyakarta, 2005), hal. 37-38

3 Lihat Gandita Rai Anom, Gagalnya Pembunuhan Karakter Melalui *Bali Post*, <http://www.balebengong.net/opini/2012/03/05/gagalnya-pembunuhan-karakter-melalui-bali-post.html> diakses 2 Juni 2013

4 Graeme Burton, *Membincangkan Televisi* (Yogyakarta, 2011), hal. 272

politik media televisi lokal yang berkaitan dengan kepentingan publik media televisi lokal terhadap proses wacana, agenda *setting*, analisis *framing*, dan menganalisis tanda-tanda visual dengan teori semiotika media. Memberikan kontribusi terhadap perkembangan budaya postmodern dan kajian media kritis, terutama yang berkaitan dengan kepentingan publik media televisi lokal terhadap proses wacana, faktor-faktor wacana yang mendukung, dan wacana tanding budaya media massa.

Tulisan ini merupakan bagian dari penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis yang mempergunakan paradigma penelitian kritis suatu paradigma berpikir, melihat pesan sebagai pertarungan kekuasaan, dan teks berita dipandang sebagai bentuk dominasi dan hegemoni satu kelompok kepada kelompok yang lain. Oleh karena itu, wacana tak bisa dilihat sebagai cerminan atau perwakilan dari entitas dan hubungan sosial, melainkan sebagai sebuah konstruksi⁵. Penelitian ini mempergunakan analisis wacana Eriyanto (2005) dengan empat teori, yakni: teori wacana, agenda *setting*, *framing*, dan semiotika diaplikasikan secara eklektik.

PEMBAHASAN

Fenomena kapitalisme media merambah bukan hanya pada media nasional, melainkan juga pada media lokal. Media lokal memproduksi dan mendistribusikan wacana dan opini di daerah untuk menyampaikan informasi, iklan, bahkan propaganda mengarahkan opini sesuai dengan kepentingan ekonomi, politik, kekuasaan, dan ideologi media tersebut. Fenomena dengan agenda *setting* mengkritisi Gubernur Bali dapat dibaca dengan jelas pada *setting* pemberitaan *Bali TV*.

Logika komersialisme dan komodifikasi telah menjadi cara berpikir dan bertindak para pengelola pers dalam kegiatan jurnalistiknya. Pers diarahkan sebagai mesin pencetak uang, pemasok iklan, dan pemburu *rating*. Dalam logika budaya seperti ini sulit menempatkan kepentingan publik di atas atau setara dengan

kepentingan pemilik modal dan kuasa media. Pengaruh kapitalisme media yang semakin kuat dapat berpengaruh buruk pada perkembangan pers ke depannya. Oleh karena itu, diperlukan aturan dan perundang-undangan yang dapat membatasi, mengayomi dan memberikan solusi. Sistem produksi, distribusi, dan konsumsi berita *Bali TV* dalam konteks ekonomi politik bersentuhan dengan sejumlah hal termasuk pengetahuan sosial dalam 'memuaskan' kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat akan informasi media yang mengedepankan fakta dan data. Fakta dan data inilah diproduksi oleh media di wilayah ekonomi politik yang rentan terhadap manipulasi. Manipulasi terjadi akibat kepentingan ekonomi, politik, kekuasaan, dan ideologi media yang didominasi oleh kekuasaan kapital.

Kekuasaan ideologi *Ajeng Bali* di *Bali TV* sebagai industri media yang berkuasa menanamkan ideologi kepada masyarakat Bali melalui opini wacana pembubaran desa *pakrama* (desa adat) yang di-*setting* dan di-*framing* sesuai dengan kepentingan ideologi Kelompok Media Bali Post (KMB). Ideologi KMB dari *Ajeng Bali* dapat berarti bahwa kita harus kembali ke asal, kembali ke Bali yang murni dan damai ketika segalanya tertib dan benar⁶. *Ajeng Bali* adalah sesuatu yang aman yang bertentangan dengan wacana pembubaran desa *pakraman*. Ideologi KMB menurut pemikiran Althusser adalah kekuasaan yang tidak seimbang atau dominasi.

Disinformasi adalah sebuah kondisi informasi kehilangan kredibilitas akibat tidak lagi mengungkapkan kebenaran, tidak lagi merepresentasikan realitas. Kepentingan pragmatis pers yang mengedepankan orientasi bisnis pada akhirnya bertemu dengan kepentingan pragmatis kekuatan politik dan kekuasaan. Fenomena ini mendorong pers tergelincir dari posisinya semula yang seharusnya independen menjadi tidak independen lagi.

Hasil analisis menunjukkan bahwa wacana liputan kasus bentrokan antar desa adat Kemoning-Budaga, Klungkung, Bali di *Bali TV* merupakan

5 Daniel Sparringa, *Analisis Wacana: Teori dan Konsep Wacana* (Surabaya, 2000), hal. 1

6 Henk Schulte Nordholt, *Bali: Sebuah Benteng Terbuka 1995-2005* (Jakarta, 2010), hal. 70

perpanjangan dari wacana media cetak *Bali Post* yang dikelola dengan agenda *setting* yang jelas untuk kepentingan sosial, politik, dan ideologi *Ajag Bali* KMB. Pertama, pemberitaan *Bali TV* tidak objektif karena menggabungkan fakta dan opini. Informasi yang disajikan kepada pemirsa meresahkan dan menyebabkan masyarakat menjadi terbelah. Kedua, ini merupakan ujian bagi profesionalisme jurnalis dan lembaga pers dalam memproduksi berita. Pers tak kebal hukum, bisa dilihat pihak yudikatif berbeda pandangan tentang pengadilan pers. Pada tingkat pertama Pengadilan Negeri Denpasar pada 7 Juli 2012 memutuskan mengabulkan gugatan Gubernur Bali. Diperkuat pada tingkat kedua Pengadilan Tinggi Denpasar pada 22 Februari 2013. *Bali Post* mengajukan kasasi ke MA pada 19 Maret 2013. Pada 23 Desember 2013, majelis mengabulkan permohonan yang membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi Denpasar. Keputusan ini disampaikan ke pihak tergugat pada 24 Desember 2014.

Kedua, praktik jurnalistik *Bali TV* pada wacana pembubaran desa *pakraman* memiliki kelemahan yakni tidak berimbang dalam pemberitaannya. Ungkapan Gubernur Bali, Made Mangku Pastika sebagai narasumber kunci di-*framing* menjadi wacana pembubaran desa *pakraman*. Kekurangprofesionalan jurnalis *Bali TV* dalam menyiarkan berita wacana pembubaran desa *pakraman* terbukti dari keputusan Dewan Pers yang menyatakan mereka melanggar kode etik. Meskipun *Bali Post* dan *Bali TV* mempunyai sumber yang kredibel mengenai ucapan Gubernur Bali, Made Mangku Pastika, untuk diberitakan, tetapi karena tidak melakukan konfirmasi menjadi memuat berita yang tidak berimbang. Tanpa mengurangi hak sumber berita yang dimuat sebagai pers yang bertanggung jawab dan profesional, *Bali Post* dan *Bali TV* diwajibkan memberikan kesempatan hak jawab kepada Gubernur.

Ketiga, pers tidak kebal hukum, buktinya wartawan *Bali Post* Biro Klungkung I Ketut Bali Putra Ariawan, Pemimpin Redaksi/ Penanggungjawab *Bali Post* I Nyoman Wirata, dan Direktur Utama PT *Bali Post* ABG Satria Naradha bisa dituntut ke pengadilan. Namun, terdapat perbedaan penafsiran atas delik pers di tingkat pertama Pengadilan Negeri Denpasar

pada 7 Juli 2012 memutuskan mengabulkan gugatan Gubernur Bali. Diperkuat pada tingkat kedua di Pengadilan Tinggi Denpasar pada 22 Februari 2013. *Bali Post* mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI di Jakarta pada 19 Maret 2013. Pada 23 Desember 2013, majelis hakim MA mengabulkan permohonan tergugat membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi Denpasar. Keputusan ini disampaikan ke pihak tergugat pada 24 Desember 2014.

SIMPULAN

Berdasarkan kajian kritis atas liputan *Bali TV* mengenai wacana pembubaran desa *pakraman* pascabentrok desa Kemoning-Budaga maka dapat ditarik tiga simpulan berikut. Pertama, proses pembentukan wacana pembubaran desa *pakraman* terjadi karena *framing*, agenda *setting* *Bali TV*. Kedua, faktor-faktor yang mendukung proses pembentukan wacana pembubaran desa *pakraman* yaitu faktor budaya media, ekonomi-politik, dan ideologi *Ajag Bali* KMB. Ketiga, wacana tanding Gubernur Bali Mangku Pastika memanfaatkan lembaga kehumasan Pemprov Bali dan media di luar KMB seperti *TVRI*, *Radar Bali*, *Bali Express*, dan *Warta Bali*.

Saran pertama, ditujukan kepada pengelola media agar bekerja secara profesional yang sesuai dengan penerimaan publik yang dijadikan masyarakat konsumennya. Artinya pada *setting*, *framing*, produksi, berita menghindari kepentingan ekonomi, politik, dan ideologi kapitalis semata. Kedua, masyarakat dan tokoh masyarakat diharapkan lebih kritis membaca berita karena isi berita tidak selalu benar. Tokoh-tokoh masyarakat yang diwawancarai menjadi narasumber diharapkan lebih kritis (berdasarkan data dan fakta) dalam berkomentar dan mengerti persoalan yang dibahas. Artinya berkomentar yang tidak mendukung kepentingan tertentu. Ketiga, kepada pemerintah dalam menghadapi konflik dengan pers agar arif dan bijaksana karena memiliki peran strategis menjadi pembina masyarakat pers. Pembinaan tersebut berupa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) wartawan atau jurnalis melalui program-program peningkatan kompetensi dalam memproduksi berita dan pembangunan literasi budaya media.

DAFTAR PUSTAKA

Burton, Graeme. *Membincangkan Televisi*. Yogyakarta: Jalasutra, 2011.

Eriyanto. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LkiS, 2005.

Nordholt, Henk Schulte. *Bali: Sebuah Benteng Terbuka 1995-2005*. Jakarta: Pustaka Larasan dan KITLV, 2010.

Putra, I Nyoman Darma. *Bali dalam Kuasa Politik*. Denpasar: Arti Foundation, 2008.

Sparringa, Daniel. *Analisis Wacana: Teori dan Konsep Wacana*. Surabaya: Fisip Unair, 2000.
